

Judul : Tax Amnesty Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 13

Tax Amnesty Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat merevisi target laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,2% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang sebelumnya ditargetkan 5,3%.

Rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* dinilai menjadi faktor penentu untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, masuknya *tax amnesty* sebagai komponen dalam APBN-P 2016 tidak hanya berdampak pada bertambahnya penerimaan negara lewat tarif tebusan. Tetapi, juga bisa mendorong pertumbuhan PDB akibat repatriasi aset.

"Dalam pembahasan dengan Komisi XI kami sependapat dengan target pertumbuhan 5,1%. Namun, kami dapat memahami bahwa target 5,1% yang dalam banyak hal karena *tax amnesty* belum dimasukkan (dalam APBN-P)," kata Agus saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR dan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Agus mengatakan, *tax amnesty* akan menambah penerimaan negara sehingga membuat belanja pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, repatriasi modal akibat *tax amnesty* juga bisa mendorong arus modal masuk (*capital inflow*) ke Tanah Air yang bisa membantu memperkuat kurs rupiah dan likuiditas yang positif bagi pembangunan.

Agus mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang

dikaji oleh BI sejauh ini masih pada kisaran 5-5,4% untuk sepanjang tahun 2016. Kendati demikian, Agus khawatir dengan dinamika ekonomi global yang tidak pasti. Hal tersebut, menyusul pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia, dari 2,9% menjadi 2,4%.

"Kami melihat pertumbuhan ekonomi global masih melambat dan ini berdampak pada belum terlihatnya perbaikan ekonomi dalam negeri karena masih melemahnya permintaan," ujar Agus.

Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, masuknya *tax amnesty* dalam APBN-P membuat pemerintah tidak perlu memangkas lebih banyak

tingkat Rp39,7 triliun dari usulan Rp205,4 triliun. Kenaikan target perpajakan didukung oleh proyeksi kenaikan PPh migas sebesar Rp12,1 triliun, atau dari Rp24,3 triliun menjadi Rp36,3 triliun, karena adanya kenaikan asumsi makro harga ICP minyak, *lifting* migas, dan *cost recovery*.

"Belanja pemerintah juga meningkat Rp35,1 triliun menjadi Rp2.082 triliun dari usulan pemerintah sebelumnya Rp2.047 triliun," jelas dia.

Defisit anggaran pun diperkecil menjadi 2,35% dari usulan awal pemerintah sebesar 2,48% terhadap PDB. Meskipun demikian, defisit itu masih lebih lebar dari proyeksi defisit dalam APBN 2016 sebesar 2,15%. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini meyakini, langkah tersebut

tidak akan mengganggu target pertumbuhan PDB tahun ini.

"Penurunan ini bagus, artinya kita tidak perlu menambah utang. Sehingga kalau pun ada kekurangan, itu kita biayai dengan saldo anggaran lebih (SAL)," imbuh Bambang.

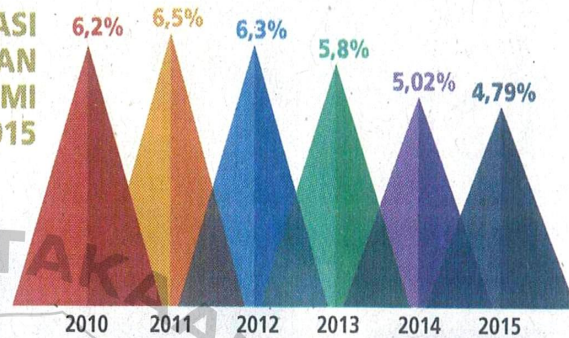
Banggar sebelumnya memang meminta pemerintah untuk memperkecil defisit tahun 2016. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menarik utang lebih banyak untuk menutupi defisit yang terjadi akibat belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Penetapan postur APBN-P 2016 secara resmi masih menunggu hasil rapat panja yang membahas belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa.

● **rahmat fiansyah/ant**

FAKTOR PENENTU

Rencana penerapan kebijakan *tax amnesty* menjadi faktor penentu untuk mencapai target pertumbuhan dalam APBN-P 2016. Pemerintah dan DPR sementara sepakat mematok target PDB 5,2% dengan memperhitungkan *tax amnesty* bisa mendorong pertumbuhan akibat repatriasi aset.

REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI 2010-2015



ASUMSI MAKROEKONOMI SEMENTARA APBN-P 2016

Pertumbuhan Ekonomi



Nilai Tukar



ICP



Inflasi



Suku Bunga SPN 3 Bulan



Produksi Minyak



Produksi Gas

